

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**LKjIP**  
**2023**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

KOTA DUMAI

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Isu Strategis.....	5
1.5. Cascading Kinerja.....	6
1.6. Peta Proses Bisnis.....	7
1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	8
2. PERENCANAAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI.....	10
2.1. Rencana Strategis.....	10
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	12
2.3. Kebijakan Strategi dan Program.....	14
2.4. Perjanjian Kinerja 2023.....	16
3. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI.....	20
3.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	22
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023.....	28
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA.....	31

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional ( Target SPM ) .....	34
3.5. Akuntabilitas Keuangan .....	34
3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	36
4. PENUTUP .....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021 – 2026;
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
6. Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, dan Realisasi Belanja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;

## DAFTAR TABEL

Tabel i Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada Tahun 2023.....	xiv
Tabel ii Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	xv
Tabel iii Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2023.....	xvi
Tabel iv Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	xviii
Tabel v Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Tahun 2023 .....	xix
Tabel vi Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2023.....	xxi
Tabel 2-1 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja .....	13
Tabel 2-2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan.....	14
Tabel 2-3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	16
Tabel 2-4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan.....	17
Tabel 2-5 Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	17
Tabel 2-6 Program Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18
Tabel 3-1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	21
Tabel 3-2 Atribut Capaian Indikator Kinerja .....	22
Tabel 3-3 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023.....	23
Tabel 3-4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	29
Tabel 3-5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra .	32
Tabel 3-6 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional .....	34
Tabel 3-7 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas) .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	4
Gambar 1-2 Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan.....	6

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**



RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT  
Pembina  
NIP. 19740515 200112 1 006

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 3 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas” dan SASARAN yang ke 3 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah dan Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan”

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (Dua) Tujuan dengan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 12 (Dua Belas) Program, 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan dan 75 (Tujuh Puluh Lima) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

## **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

### **1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan: **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**  
Sub Kegiatan:
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan: **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**  
Sub Kegiatan:
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan: **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**  
Sub Kegiatan:
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan: **Administrasi Umum Perangkat Daerah**  
Sub Kegiatan:
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Kegiatan: **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
Sub Kegiatan:
  - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Alat Besar
  - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan: **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
Sub Kegiatan:
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan: **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

## **Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

1. Kegiatan: **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
  - 2) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
  - 3) Pembangunan Unit Air Baku
  - 4) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
  - 5) Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
  - 6) Rehabilitasi Tanggul Sungai
  - 7) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
  - 8) Normalisasi/Restorasi Sungai
2. Kegiatan: **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

## **III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

1. Kegiatan: **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- 2) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 3) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

#### **IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

##### **1. Kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

#### **V. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

##### **1. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

#### **VI. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**

##### **1. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- 2) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 3) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

#### **VII. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**

##### **1. Kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan**

## **Strategis Daerah Kabupaten/ Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

## **VIII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

1. Kegiatan: **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- 2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

## **IX. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

1. Kegiatan: **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

## **X. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

1. Kegiatan: **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- 2) Pembangunan Jalan
- 3) Rehabilitasi Jalan
- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan
- 5) Pembangunan Jembatan
- 6) Rehabilitasi Jembatan

## **XI. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

### **1. Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

Sub Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 2) Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

### **2. Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 2) Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 3) Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

### **3. Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota
- 2) Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

### **4. Kegiatan: Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 2) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

## **XII. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

### **1. Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- 2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang

## Penataan Ruang

### 2. Kegiatan: **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

### 3. Kegiatan: **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Sistem Informasi Penataan Ruang

### 4. Kegiatan: **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel i. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	53,72 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%
4	Meningkatnya	Persentase kemantapan	54,12%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Aksesibilitas Wilayah	jalan	
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	86%
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	7,75%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 150.064.494.285 (Seratus Lima Puluh Milyar Enam puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) untuk melaksanakan 12 (Dua Belas) Program Kerja antara lain:

Tabel ii. Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	12.664.370.517	APBD
2	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	22.736.100.000	APBD
3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	8.665.500.000	APBD
4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1.171.360.000	APBD
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	700.000.000	APBD
6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	17.032.515.300	APBD
7	Program pengembangan permukiman	2.631.879.200	APBD
8	Program penataan bangunan Gedung	45.238.178.200	APBD
9	Program penataan bangunan dan lingkungannya	400.000.000	APBD
10	Program penyelenggaraan jalan	36.723.988.875	APBD
11	Program pengembangan jasa konstruksi	141.520.000	APBD

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.959.082.193	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>150.064.494.285</b>	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel iii. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	19.222.513.747	APBD
2	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	59.790.542.360	APBD
3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	12.735.500.000	APBD
4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	11.171.360.000	APBD
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	693.578.000	APBD
6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	35.653.104.760	APBD
7	Program pengembangan permukiman	2.663.379.200	APBD
8	Program penataan bangunan Gedung	81.819.509.161	APBD
9	Program penataan bangunan dan lingkungannya	400.000.000	APBD
10	Program penyelenggaraan jalan	228.866.388.103	APBD, DAK, DID
11	Program pengembangan jasa konstruksi	201.520.000	APBD
12	Program penyelenggaraan penataan ruang	3.023.138.193	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>456.240.533.524</b>	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel iv. Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	53,72 %	58,28%	100%	✓			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	82,35%	82,35%		✓		
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%	90%	100%	✓			
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemandapan jalan	54,12%	53,09%	98,09%	✓			
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	86%	86%	100%	✓			
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%	0	0				✓
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	7,75%	7,75%	100%	✓			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.456.240.533.524 bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp.115.780.685.724 dan BELANJA MODAL sebesar Rp.340.459.847.800.

1. Belanja Operasi : Rp 115.780.685.724
2. Belanja Modal : Rp 340.459.847.800

Sedangkan ~~jumlah~~ pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 sebesar ~~Rp.456.240.533.524~~ Rp.456.240.533.524

Tabel v. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Tahun 2023

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00%	100,00%	100,00%	19.222.513.747	17.336.749.219,78	90,19 %
Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase Peningkatan Luas wilayah Banjir yang Ditangani	14,00%	14,00%	100,00%	59.790.542.360	57.514.856.165,36	96,19 %
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Penduduk Terlayani spam Jaringan Perpipaan	29,68%	29,68%	100,00%	12.735.500.000	12.688.574.215,44	99,63 %
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100,00%	100,00%	100,00%	11.171.360.000	11.064.779.110	99,05 %

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Rumah tangga Yang mendapat Akses layak Sanitasi	100,00%	100,00%	100,00%	693.578.000	562.843.113	81,15 %
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	40%	40%	100,00%	35.653.104.760	30.532.802.583	85,64 %
Program pengembangan permukiman	Persentase Pengembangan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	2.663.379.200	2.652.843.769,44	99,60 %
Program penataan bangunan gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	15,00%	15,00%	100,00%	81.819.509.161	75.245.456.279,34	91,97 %
Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	42,86%	42,86%	100,00%	400.000.000	398.629.950	99,66 %
Program penyelenggaraan jalan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi baik	4,00%	4,00%	100,00%	228.866.388.103	222.889.741.226,84	97,39 %
Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	201.520.000	190.364.000	94,46 %
Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	59,99%	59,99%	100,00%	3.023.138.193	2.918.342.149	96,53 %

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaaer Daya Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel vi. Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIA N KINERJA ( % )	PENYERAPA N ANGGARAN ( % )	TINGKAT EFISIEN SI	KETERANG AN
1.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum.	Persentase penduduk berakses air minum	100%	99,63%	EFISIEN	
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,35%	81,15%	EFISIEN	
		Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	100%	95,81%	EFISIEN	
		Persentase kemantapan jalan	98,10%	98,50%	EFISIEN	
		Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	100%	90,92%	EFISIEN	
		Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	0	94,46%	KURANG EFISIEN	
2.	Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatanruang Dengan Peruntukkannya	100%	96,53%	EFISIEN	

Analisis atas efisiensi peggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Berakses Air Minum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase

penyerapan anggaran tahun 2023 (99,63%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN.

2. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik persentase capaian kinerja tahun 2023 (82,35%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (81,15%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN.
3. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Bangunan Gedung Dan Sarana Strategis Kota Yang Diselenggarakan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95,81%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN.
4. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kemantapan Jalan Persentase capaian kinerja tahun 2023 (98,10%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,50%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN.
5. Pada Indikator Kinerja Utama Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun Persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (90,92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN.
6. Pada Indikator Kinerja Utama Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah Persentase capaian kinerja tahun 2023 (0) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,46%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN.
7. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya Persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95,53%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntable terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab ( responsibilitas ) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

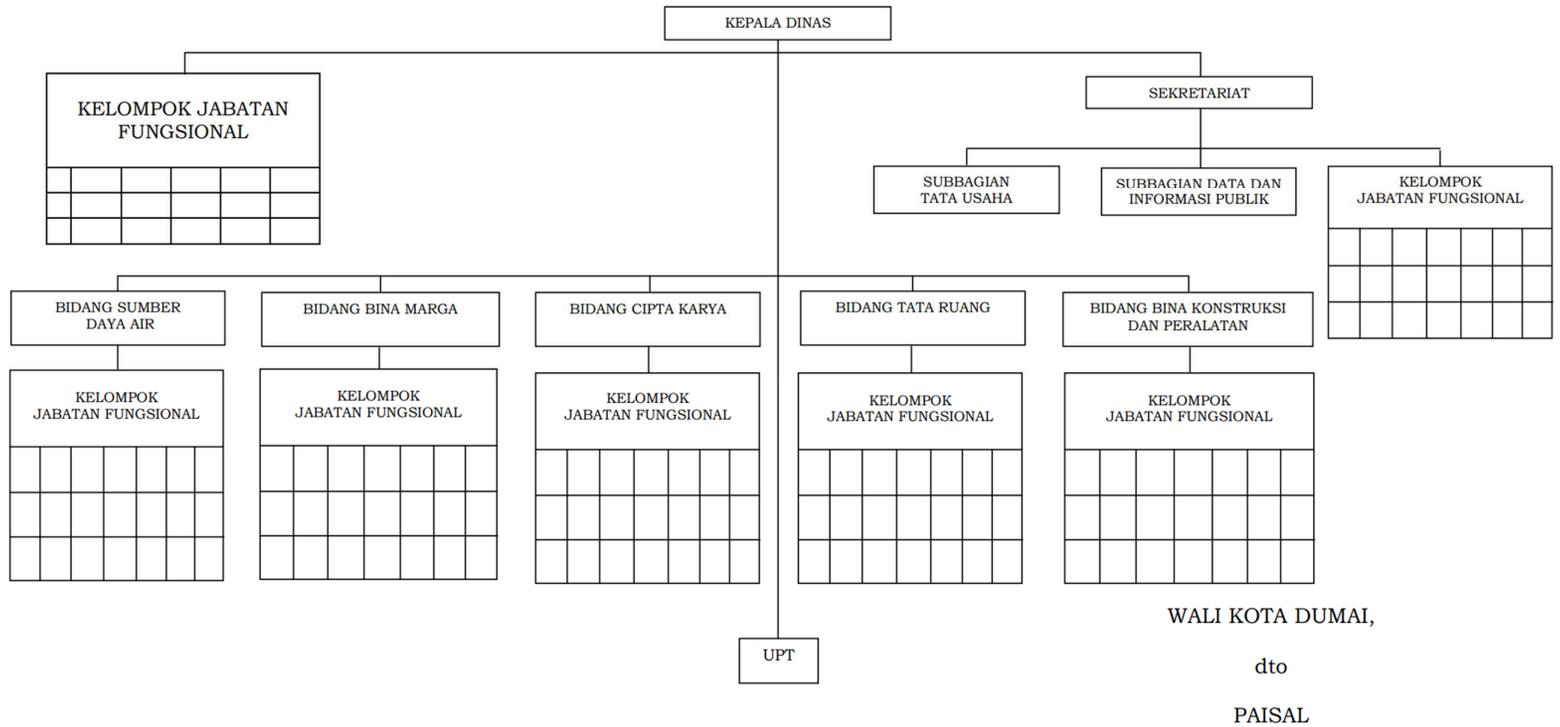
- f. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber DayaAir, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;

- g. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- i. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Tata Usaha;
  - 2. Subbagian Data dan Informasi Publik; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :  
Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan, terdiri dari:  
Kelompok Jabatan Fungsional
- e. UPT;

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- d. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **1.4. Isu Strategis**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

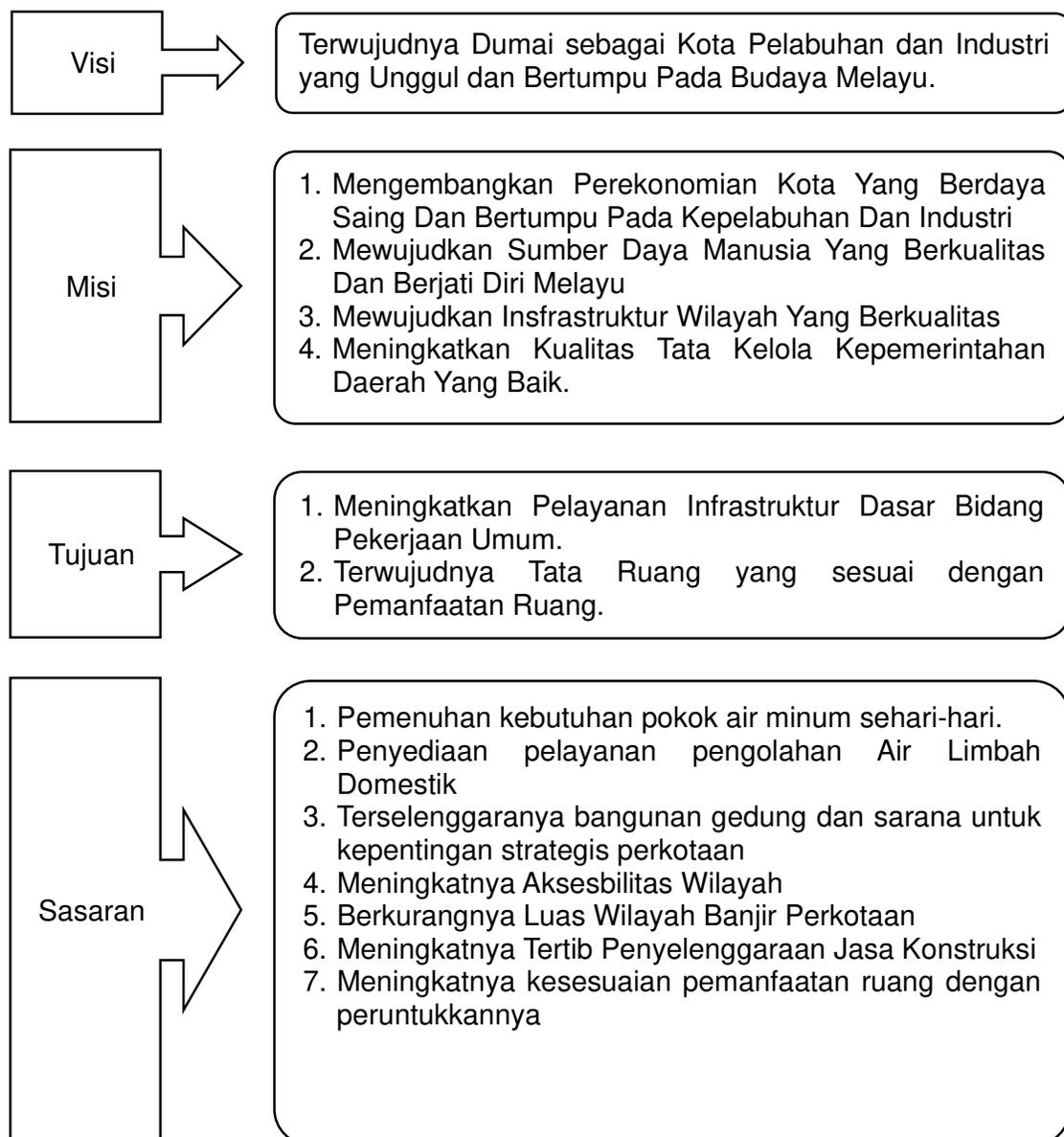
Isu strategis terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu ditangani sbb:

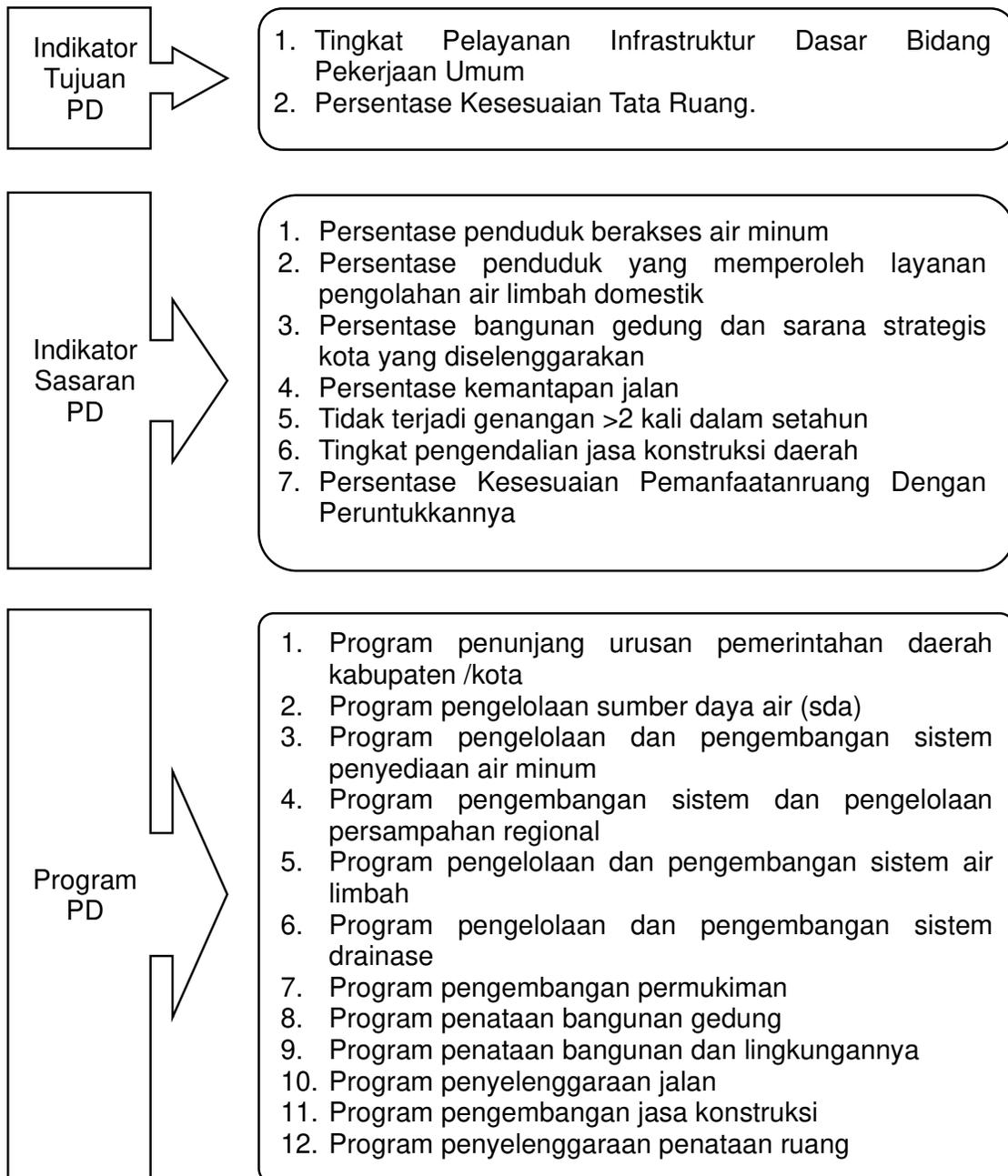
- a. Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dan lain-lain) tidak sebanding dengan pembangunannya;
- b. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur (jalan, drainase dan lain-lain) daerah;
- c. Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,5 m;
- d. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai;

## 1.5. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1-2 Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

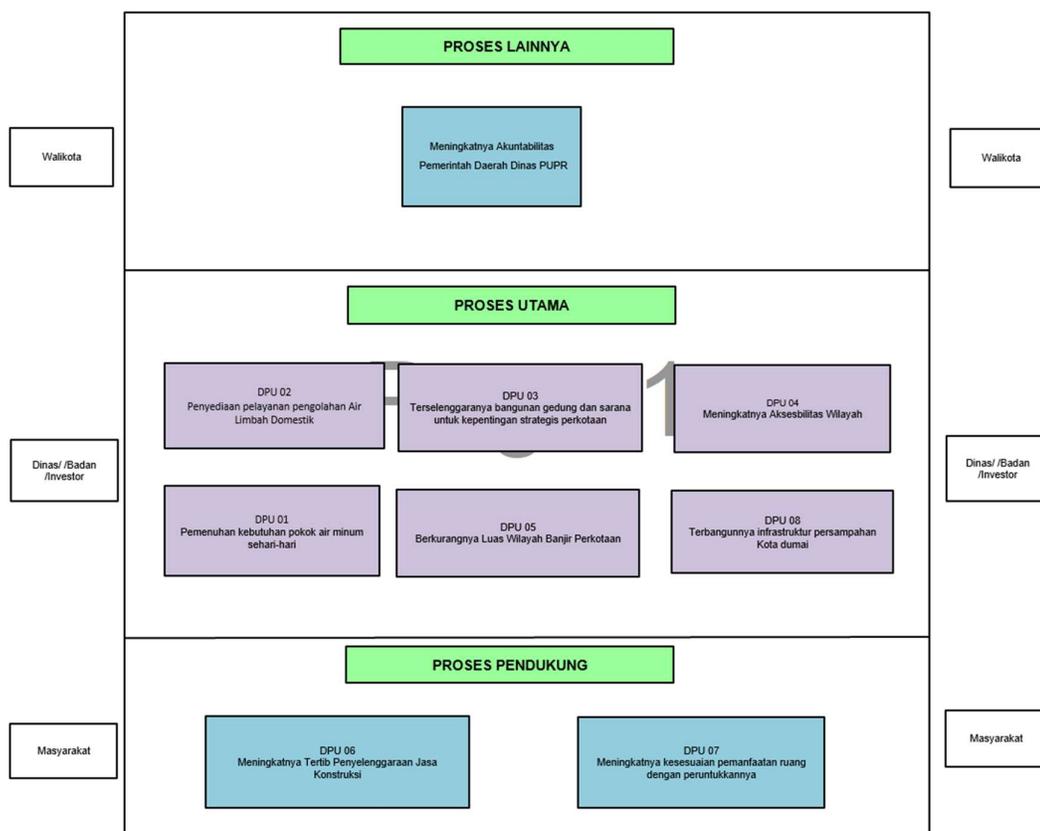




### 1.6. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebagaimana skema berikut:

Gambar 1-3 Peta Proses Bisnis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



### 1.7. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1298.1/INSP-S, Tanggal 8 Desember 2023 Hal Hasil Implementasi SAKIP Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1-1 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Kelemahan / Kekurangan	Saran / Rekomendasi
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat melampirkan target	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan melampirkan target

No	Kelemahan / Kekurangan	Saran / Rekomendasi
	yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis	yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat melampirkan perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan melampirkan perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat melampirkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di harapkan melampirkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat melampirkan data yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan melampirkan data yang mendukung capaian kinerja yang diharapkan
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat melampirkan bukti dukung yang menggambarkan bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang sebahagian direncanakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan melampirkan bukti dukung yang menggambarkan bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang sebahagian direncanakan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dapat melampirkan bukti dukung yang menggambarkan bahwa setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang sebahagian direncanakan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan melampirkan bukti dukung yang menggambarkan bahwa setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang sebahagian direncanakan

## **2. PERENCANAAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

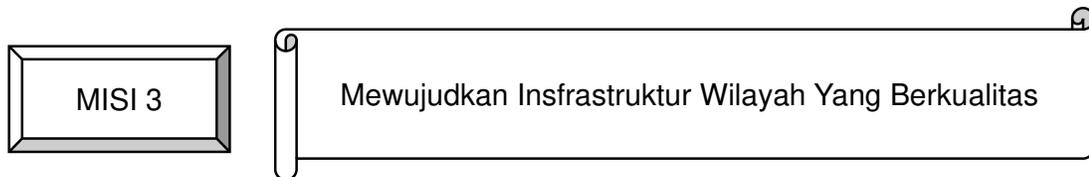
Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 ( Lima ) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai tersebut adalah pada Misi 3 Kota Dumai:



## **2.2. Tujuan dan Sasaran**

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 ( lima ) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-1 Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

<b>Visi</b> : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
<b>Misi ke 3</b> : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum	68,41 %	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	53,72 %
			Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %
			Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%
			Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemantapan jalan	54,12%
			Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	86%
			Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%
			Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang.	Persentase Kesesuaian Tata Ruang.	7,75%

### 2.3. Kebijakan Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2-2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

<b>Visi</b> : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
<b>Misi ke 3</b> : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan pemukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Pemenuhan Kebutuhan bangunan Gedung strategis Kota Dumai	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Gedung strategis kota dumai
	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung Pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Meningkatkan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara

<b>Visi</b> : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
<b>Misi ke 3</b> : Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Meningkatkan kualitas SDM Jasa Konstruksi Kota Dumai	Mengoptimalkan Sosialisasi dan Pelatihan Bina Jasa Konstruksi
Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota
2. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
4. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
7. Program pengembangan permukiman
8. Program penataan bangunan gedung
9. Program penataan bangunan dan lingkungannya
10. Program penyelenggaraan jalan
11. Program pengembangan jasa konstruksi
12. Program penyelenggaraan penataan ruang

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2-3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemantapan jalan
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya

#### 2.4. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021 -

2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	53,72 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemandapan jalan	54,12%
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	86%
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	7,75%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 150.064.494.285 (Seratus Lima Puluh Milyar Enam puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) untuk melaksanakan 12 ( Dua Belas) Program Kerja antara lain :

Tabel 2-5 Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program penunjang urusan	12.664.370.517	APBD

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
	pemerintahan daerah kabupaten /kota		
2	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	22.736.100.000	APBD
3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	8.665.500.000	APBD
4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1.171.360.000	APBD
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	700.000.000	APBD
6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	17.032.515.300	APBD
7	Program pengembangan permukiman	2.631.879.200	APBD
8	Program penataan bangunan gedung	45.238.178.200	APBD
9	Program penataan bangunan dan lingkungannya	400.000.000	APBD
10	Program penyelenggaraan jalan	36.723.988.875	APBD
11	Program pengembangan jasa konstruksi	141.520.000	APBD
12	Program penyelenggaraan penataan ruang	1.959.082.193	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>150.064.494.285</b>	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-6 Program Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	19.222.513.747	APBD
2	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	59.790.542.360	APBD
3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	12.735.500.000	APBD
4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	11.171.360.000	APBD
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	693.578.000	APBD
6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	35.653.104.760	APBD
7	Program pengembangan permukiman	2.663.379.200	APBD
8	Program penataan bangunan gedung	81.819.509.161	APBD
9	Program penataan bangunan dan lingkungannya	400.000.000	APBD
10	Program penyelenggaraan jalan	228.866.388.103	APBD, DAK, DID

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
11	Program pengembangan jasa konstruksi	201.520.000	APBD
12	Program penyelenggaraan penataan ruang	3.023.138.193	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>456.240.533.524</b>	

### **3. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 Tahun 2014).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3-1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$Capaian = Target \times \frac{Realisasi - Target}{Target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3-2 Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<b>Sangat Berhasil</b>
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Tidak Berhasil</b>

### 3.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai telah menetapkan 7 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 7 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam table dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3-3 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2022		2023			
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	55,26%	100%	53,72 %	58,28%	100%	Sangat Tinggi
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,83%	92.83%	100 %	82,35%	82,35%	Tinggi
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	70,00%	100%	66,27%	90%	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemantapan jalan	56,41%	100%	54,12%	53,09%	98,09%	Sangat Tinggi
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	92%	100%	86%	86%	100%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	0	0	100%	0	0	Sangat Rendah
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	5,25%	100%	7,75%	7,75%	100%	Sangat Tinggi

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase penduduk berakses air Minum
  - a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase penduduk berakses air minum menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 53,72% realisasi sebesar 58,28%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 55,26% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 3,02%
  - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
    - ketersediaan alat dan tenaga kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan
  - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase penduduk berakses air minum adalah sebagai berikut :
    - terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu serta terjadinya banjir akibat air pasang/ROB dan air hujan
  - d. Tindak Lanjut Capaian Indikator Persentase penduduk berakses air minum adalah sebagai berikut :
    - melaksanakan kegiatan lebih cepat pada saat musim panas atau kemarau serta memastikan ketersediaan material yang dibutuhkan didalam pekerjaan
  
2. Indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
  - a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 82,35%, tercapai 82,35% atau bernilai kinerja Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 92,83% atau tercapai sebesar 92,83%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 10,48%

- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik kurang melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
    - Terlaksananya kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
  - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut:
    - Ketersediaan data yang kurang akurat
    - Sumber daya Manusia yang belum sesuai kompetensi
  - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut:
    - perbaikan data sesuai dengan acuan dan data primer dilapangan dan kooridasi ke OPD terkait
    - melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM sesuai kompetensi
3. Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan.
- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 66,27% realisasi sebesar 90%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 70% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 menurun/meningkat sebesar 20%
  - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
    - Terlaksananya kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
  - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:
    - terjadinya eror pada sistem PBG
    - Terjadinya Force majeure pada saat pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh faktor cuaca

- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:
    - pengiputan ulang persyaratan pada Sistem PBG
    - Penambahan jam kerja dan waktu pelaksanaan, dan penambahan tenaga kerja lapangan
4. Persentase kemantapan jalan
- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase kemantapan jalan menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 54,12% realisasi sebesar 53,09% tercapai 98,09% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 56,41% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 3,32%
  - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase kemantapan jalan kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
    - Terwujudnya Kondisi mantap Ruas jalan dan Jembatan
    - Tercapainya Target Pembangunan jalan
  - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase kemantapan jalan adalah sebagai berikut:
    - Belum Sesuainya SHP dan Google Map
    - Terjadinya Pancaroba Cuaca dan Air Pasang Air Laut
  - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase kemantapan jalan adalah sebagai berikut:
    - Update Status Jalan dan Jembatan
    - Menangani Banjir
5. Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun
- a. Capaian kinerja untuk indikator Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 86% realisasi sebesar 86%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 92% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 6%.

- b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
    - ketersediaan alat dan tenaga kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan
  - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun adalah sebagai berikut:
    - Pengajuan perubahan dokumen AMDAL menjadi UKL/UP sesuai dengan Permen LHK No. 44 tahun 2021 baru disetujui pada bulan 10 Oktober 2023 dimana sudah melewati masa penyusunan anggaran perubahan 2023
    - terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu serta terjadinya banjir akibat air hujan
  - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun adalah sebagai berikut:
    - Menganggarkan Dokumen UKL/UPL Embung TWA pada APBD Tahun berikutnya
    - melaksanakan kegiatan lebih cepat pada saat musim panas atau kemarau serta memastikan ketersediaan material yang dibutuhkan didalam pekerjaan
    - melaksanakan kegiatan lebih cepat pada saat musim panas atau kemarau
6. Indikator Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah
- a. Capaian kinerja untuk indikator 0% menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 0% tercapai 0% atau bernilai kinerja Sangat Rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0% atau tercapai sebesar 0%.
  - b. Faktor Pendorong Capaian Indikator Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah adalah sebagai berikut :
    - Pelaksanaan Kegiatan memerlukan Alokasi Anggaran
  - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah adalah sebagai berikut:
    - Tidak adanya Alokasi Anggaran

- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah adalah sebagai berikut:
  - Melakukan Penganggaran untuk mencapai target
7. Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya
  - a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 7,75% realisasi sebesar 7,75% tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 5,25% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 2,5%
  - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
    - Terlaksananya kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
  - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya adalah sebagai berikut:
    - Kurangnya Transportasi untuk pengawasan
  - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya adalah sebagai berikut:
    - Penganggaran transportasi untuk pengawasan

### **3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023**

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3-4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air Minum	40,79%	53,72 %	55,26%	58,28%	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100 %	92,83%	82,35%	92.83%	82,35%
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%	66,27%	70,00%	90%	100%	100%
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemantapan jalan	53,82%	54,12%	56,41%	53,09%	100%	98,09%
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	93%	86%	93%	86%	100%	100%
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%	100%	0	0	0	0
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	5,25%	7,75%	5,25%	7,75%	100%	100%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat Tujuh Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota DUmair selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Persentase penduduk berakses air Minum dengan target pada tahun 2022 adalah 40,79%.
- 1b. Realisasi pada tahun 2022 adalah 55,26% dengan capaian 100%.
- 1c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 53,72% dan realisasinya adalah 58,28% capaian kinerja 100%.
  
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target pada tahun 2022 adalah 100%.
- 2b. Realisasi pada tahun 2022 adalah 92,83% dengan capaian 92.83%.
- 2c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 100% dan realisasinya adalah 82,35% capaian kinerja 82,35%.  
Tidak tercapainya realisasi dikarenakan terjadinya ketersediaan data yang kurang akurat dan sumber daya manusia yang belum sesuai kompetensi.
  
- 3a. Indikator Kinerja Yang ke tiga adalah Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan dengan target pada tahun 2022 adalah 66,27%.
- 3b. Realisasi pada tahun 2022 adalah 70,00% dengan capaian 100%.
- 3c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 66,27% dan realisasinya adalah 90% capaian kinerja 100%.
  
- 4a. Indikator Kinerja Yang ke empat adalah Persentase kemantapan jalan dengan target pada tahun 2022 adalah 53,82%.
- 4b. Realisasi pada tahun 2022 adalah 56,41% dengan capaian 100%.
- 4c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 54,12% dan realisasinya adalah 53,09% capaian kinerja 98,09%.  
Tidak tercapainya realisasi dikarenakan belum sesuainya shp dan google map dan terjadinya pancaroba cuaca dan air pasang air laut.

- 5a. Indikator Kinerja Yang ke lima adalah Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun dengan target pada tahun 2022 adalah 93%.
- 5b. Realisasi pada tahun 2022 adalah 93% dengan capaian 100%.
- 5c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 86% dan realisasinya adalah 86% capaian kinerja 100%.
- 
- 6a. Indikator Kinerja Yang ke enam adalah Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah dengan target pada tahun 2022 adalah 100%.
- 6b. Realisasi pada tahun 2022 adalah 0 dengan capaian 0
- 6c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 100% dan realisasinya adalah 0 capaian kinerja 0.
- Tidak tercapainya realisasi dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran.
- 
- 7a. Indikator Kinerja Yang ke tujuh adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya dengan target pada tahun 2022 adalah 5,25%.
- 7b. Realisasi pada tahun 2022 adalah 47,53% dengan capaian 100%.
- 7c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 7,75% dan realisasinya adalah 48,46% capaian kinerja 100%.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) tahun 2023 dapat dikatakan BERHASIL.

### **3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3-5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air Minum	74,68%	58,28%	78,04%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	82,35%	82,35%
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%	90%	100%
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemantapan jalan	55,02%	53,09%	96,49%
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	65%	86%	86%
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%	0	0
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan	15,25%	7,75%	100%

	ruang dengan peruntukannya	ruang Dengan Peruntukannya			
--	----------------------------	----------------------------	--	--	--

Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase penduduk berakses air Minum sebagai berikut :
  - Menyediakan alat dan tenaga kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan
2. Capaian Indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebagai berikut :
  - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Capaian Indikator Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan sebagai berikut :
  - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Capaian Indikator Persentase kemantapan jalan sebagai berikut :
  - Melakukan survei kondisi mantap ruas jalan dan jembatan sehingga tercapainya target pembangunan jalan
5. Capaian Indikator Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun sebagai berikut :
  - Menyediakan alat dan tenaga kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan
6. Capaian Indikator Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah sebagai berikut :
  -

7. Capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku

### 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional ( Target SPM )

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional ( Target SPM ) sebagaimana table berikut :

Tabel 3-6 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Keterangan

### 3.5. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.456.240.533.524 bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp.115.780.685.724 dan BELANJA MODAL sebesar Rp.340.459.847.800.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 433.995.981.781,20, terdiri dari Belanja Operasi Rp.111.481.755.859,25 dan Belanja Modal terealisasi Rp.322.514.225.921,95.

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3-7 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rata - rata
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-	Program pengelolaan dan pengembangan	12.735.500.000	12.688.574.215	99,63	

	hari	sistem penyediaan air minum				
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	693.578.000	562.843.113	81,15	
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Program penataan bangunan gedung	81.819.509.161	75.245.456.279	91,97	
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	400.000.000	398.629.950	99,66	
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Program penyelenggaraan jalan	228.866.388.103	222.889.741.227	97,39	
		Program pengembangan permukiman	2.663.379.200	2.652.843.769	99,60	
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	59.790.542.360	57.514.856.165	96,19	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	35.653.104.760	30.532.802.583	85,64	
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi	201.520.000	190.364.000	94,46	

7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Program penyelenggaraan penataan ruang	3.023.138.193	2.918.342.149	96,53	
---	--	--	---------------	---------------	-------	--

Total anggaran belanja adalah Rp.456.240.533.524 dengan realisasi Rp.433.995.981.781,20 atau dengan capaian sebesar 95,12 % dari total anggaran. Anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perpanjangan waktu sehingga menyebabkan penundaan pembayaran.

### **3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00%	100,00%	100,00%	19.222.513.747	17.336.749.219,78	90,19 %
Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase Peningkatan Luas wilayah Banjir yang Ditangani	14,00%	14,00%	100,00%	59.790.542.360	57.514.856.165,36	96,19 %
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Penduduk Terlayani spam Jaringan Perpipaan	29,68%	29,68%	100,00%	12.735.500.000	12.688.574.215,44	99,63 %

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100,00%	100,00%	100,00%	11.171.360.000	11.064.779.110	99,05 %
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Rumah tangga Yang mendapat Akses layak Sanitasi	100,00%	100,00%	100,00%	693.578.000	562.843.113	81,15 %
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	40%	40%	100,00%	35.653.104.760	30.532.802.583	85,64 %
Program pengembangan permukiman	Persentase Pengembangan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	2.663.379.200	2.652.843.769,44	99,60 %

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program penataan bangunan gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	15,00%	15,00%	100,00%	81.819.509.161	75.245.456.279,34	91,97 %
Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	42,86%	42,86%	100,00%	400.000.000	398.629.950	99,66 %
Program penyelenggaraan jalan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi baik	4,00%	4,00%	100,00%	228.866.388.103	222.889.741.226,84	97,39 %
Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	201.520.000	190.364.000	94,46 %
Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian	59,99%	59,99%	100,00%	3.023.138.193	2.918.342.149	96,53 %

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	Penataan Ruang						

#### 4. PENUTUP

Memberikan penjelasan simpulan terhadap capaian target, apakah telah/belum memenuhi target, apakah telah efisien dan apakah terdapat penghematan sumber daya dalam pencapaian target tahun 2023.

Permasalahan yang dihadapi dan saran solusi/jalan keluar untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**



RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT  
Pembina  
NIP. 19740515 200112 1 006



TUJUAN									SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI	TARGET (%)					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI	TARGET (%)					STRATEGI	KEBIJAKAN		PROGRAM
				2021	2022	2023	2024	2025					2026	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang / Luas Peruntukan Pemanfaatan Ruang X	0,25	5,25	7,75	10,25	12,75	15,25	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang / Luas Peruntukan Pemanfaatan Ruang X 100%	0,25	5,25	7,75	10,25	12,75	15,25	Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW	Program penyelenggaraan penataan ruang	

Kota Dumai, 15 Januari 2024

PLA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



WALYATI ALAMSYAH, ST. MT

NIP. 19740515 200112 1 006

**RENCANA KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB. KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air	53,72%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Penduduk Terlayani spam Jaringan Perpipaan	29,68%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.735.500.000
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen	192.564.000
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR terlayani Sumur Bor Dalam	120 SR	2.322.600.000
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan	2500 SR	10.220.336.000
Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%	11.171.360.000
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSKewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	171.360.000
						Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	25.000 Rumah Tangga	11.000.000.000
Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%	Program penataan bangunan gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	5%	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10 Kegiatan	81.819.509.161

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB. KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	300.800.000
						Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	76.476.727.961
						Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit	5.041.981.200
			Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan	100%	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2 Lokasi	400.000.000
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000
Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemandapan jalan	54,12%	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Baik	2%	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM	228.866.388.103
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	200.000.000
						Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	15 KM	185.023.910.863

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB. KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Rehabilitasi Jalan	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan	2 KM	14.357.826.300
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan	2,79 KM	18.497.950.000
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	50 M	8.160.570.940
						Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan	50 M	2.626.130.000
			Program pengembangan permukiman	Persentase Pengembangan Permukiman'	100%	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.663.379.200
						Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur kota	3 Sistem Jaringan	2.663.379.200
Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	86%	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	7,00%	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	7%	58.281.102.360
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan	2 Dokumen	789.943.776
						Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Unit	798.440.000
						Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah pembangunan Unit Air Baku	1 KM	97.250.294
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Turap yang dibangun	1 KM	6.777.690.835
						Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit	5.418.137.960

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB. KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara	3 KM	4.656.099.995
						Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air yang dipelihara	40 Unit	1.576.184.000
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	100 KM	38.167.355.500
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 KM	1.509.440.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	2 KM	1.509.440.000
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	16.000 M	35.653.104.760
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	404.800.000
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	2.000 M	30.895.235.960
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dipelihara	3.000 M	4.353.068.800
Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan Jasa Konstruksi	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60 Orang	76.707.600
						Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Profesional	20 Orang	534.600
						Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	76.173.000

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB. KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	77.148.000
						Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	1 Laporan	39.843.600
						Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Sistem Jasa Konstruksi	1 Dokumen	702.600
						Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	36.601.800
						Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	2 Dokumen	7.374.400
						Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional	1 Dokumen	4.064.400
						Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	1 Dokumen	3.310.000
						Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2 Dokumen	40.290.000
						Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	39.843.600

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB. KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	446.400
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	7,75%	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Penataan Ruang	2,50%	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	866.501.498
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	765.320.798
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2 Kegiatan	101.180.700
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.000.000.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	293.658.300
						Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	293.658.300

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB. KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	862.978.395
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	35.050.900
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertibandan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	115.940.995
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	711.986.500

Kota Dumai, 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



**PATRIYA ALAMSYAH, ST. MT**

Pembina

NIP. 19740515 200112 1 006



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **REZA FAHLEPI, ST**

Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**H. PAISAL, SKM, MARS**

Dumai, 9 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



**REZA FAHLEPI, ST**

NIP. 19830809 200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	59.07
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	63
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	%	54.12
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4,570.13
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	62.49
8	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	%	46.30

Sasaran 1	: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. 03. 03	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum</b>	Rp.	8,665,500,000
Sasaran 2	: Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	1. 03. 05	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	Rp.	700,000,000
Sasaran 3	: Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	1. 03. 08	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	Rp.	45,238,178,200
		1. 03. 09	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>	Rp.	400,000,000
Sasaran 4	: Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	1. 03. 07	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>	Rp.	2,631,879,200
		1. 03. 10	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	Rp.	36,723,988,875
Sasaran 5	: Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	1. 03. 02	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya air ( SDA )</b>	Rp.	22,736,100,000
		1. 03. 06	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	Rp.	17,032,515,300
Sasaran 6	: Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1. 03. 11	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	Rp.	141,520,000
Sasaran 7	: Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	1. 03. 12	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Rp.	1,959,082,193
Sasaran 8	: Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	1. 03. 04	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	Rp.	1,171,360,000
			<b>Jumlah</b>	Rp.	137,400,123,768

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 9 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



REZA FAHLEPI, ST

Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19830809 200904 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

**H. PAISAL, SKM, MARS**

Dumai, September 2023

PIHAK PERTAMA



**RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT**  
NIP. 19740515 200112 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	59,07
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	63
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	%	54,12
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.570,13
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	62,49
8	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	%	46,30

Sasaran 1	: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. 03. 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	12.735.500.000
Sasaran 2	: Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	1. 03. 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	693.578.000
Sasaran 3	: Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	1. 03. 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	81.639.509.161
		1. 03. 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp.	400.000.000
Sasaran 4	: Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	1. 03. 07	Program Pengembangan Permukiman	Rp.	2.663.379.200
		1. 03. 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	190.919.556.037
Sasaran 5	: Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	1. 03. 02	Program Pengelolaan Sumber Daya air ( SDA )	Rp.	59.790.542.360
		1. 03. 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	34.153.104.760
Sasaran 6	: Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1. 03. 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	201.520.000
Sasaran 7	: Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	1. 03. 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	3.023.138.193
Sasaran 8	: Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	1. 03. 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	6.171.360.000
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>392.391.187.711</b>

Dumai, September 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA



RIAL SATRYA ALAMSYAH, ST. MT  
Pembina / IV a  
NIP. 19740515 200112 1 006

**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)		(4)	(5)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	59,07
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	63
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	%	54,12
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.570,13
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	62,49
8	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	%	46,30

Dumai, September 2023  
Pihak Pertama  
KORNERALA



**RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT**  
Pembina / IV a  
NIP. 19740515 200112 1 006

**PERUBAHAN RENCANA AKSI  
TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Pelaksanaan				Program	Indikator	Target	Pagu
				Tahunan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	59,07	43,71	44,52	47,64	49,25	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan		12.735.500.000
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100	25	50	75	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		693.578.000
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	63	48	49	55	58,0	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung		81.639.509.161
									Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya		400.000.000
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase Kemantapan Jalan	%	54,12	53,52	53,55	53,69	53,82	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pengembangan Permukiman		2.663.379.200
									Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik		190.919.556.037
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4.570,13	5284	5152	4986	4570,13	Program Pengelolaan Sumber Daya air ( SDA )	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani		59.790.542.360
									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		34.153.104.760

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Pelaksanaan				Program	Indikator	Target	Pagu
				Tahunan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Program		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100	25	50	75	100	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi		201.520.000
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	62,49	57,49	57,89	58,53	59,99	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang		3.023.138.193
8	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3 R/TPS Kota Dumai	%	46,30	37,96	38,23	39,84	41,67	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		6.171.360.000
											<b>Jumlah</b>	<b>392.391.187.711</b>

KEPALA



**RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT**  
Pembina / Wa  
NIP. 19740515 200112 1 006

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2022-2026  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

No.	Indikator	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	49.25	59.07	64.27	67.90	71.39
2	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	58	63	68	73	78
4	Persentase Kemantapan Jalan	%	53.82	54.12	54.42	54.72	55.02
5	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Ha	4914.12	4570.13	4250.13	3952.71	3676.02
6	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	%	100	100	100	100	100
7	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	%	59.99	62.49	64.99	67.49	69.99
8	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	%	41.67	46.30	50.93	55.56	60.19

Dumai, September 2023

KEPALA



**RIAN SATRYA ALAMSYAH, ST. MT**

Pembina / IV a

NIP. 19740515 200112 1 006



**Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, dan Realisasi Belanja Tahun 2023  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai**

No.	Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.222.513.747	17.336.749.220	90,19
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.995.400	81.131.290	55,57
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.891.400	14.291.350	44,81
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.319.400	10.036.900	57,95
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.319.400	9.989.300	57,68
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.319.400	10.087.300	58,24
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.319.400	10.024.300	57,88
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.319.400	12.584.740	72,66
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.507.000	14.117.400	51,32
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.838.925.840	7.585.048.171	96,76
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.821.489.440	7.572.139.334	96,81
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.436.400	12.908.837	74,03
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.321.400	48.112.948	68,42
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22.132.200	14.071.150	63,58
3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	24.100.000	22.168.548	91,99
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.089.200	11.873.250	49,29
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	148.501.741	74,25
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	148.501.741	74,25
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.305.225.463	1.087.567.533	83,32
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.884.100	15.473.000	50,10
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298.160.400	252.840.700	84,80
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.710.400	39.603.500	32,54
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	133.981.963	106.209.182	79,27
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	51.650.000	95,65
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	607.425.000	602.659.436	99,22
5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.063.600	19.131.715	32,39
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.318.651.400	4.267.168.250	98,81
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000	125.160.000	99,96
6.2	Pengadaan Alat Besar	3.520.468.600	3.487.492.700	99,06
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	672.974.800	654.515.550	97,26
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.319.640.444	1.502.802.667	64,79
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.061.463.004	332.734.450	31,35
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.177.440	1.170.068.217	93,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.023.753.800	2.616.416.620	86,53
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.230.000	18.000.000	84,79
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	627.824.600	475.620.960	75,76

No.	Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
8.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.318.169.200	2.099.552.760	90,57
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.530.000	23.242.900	41,12
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>59.790.542.360</b>	<b>57.514.856.165</b>	<b>96,19</b>
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.281.102.360	56.012.892.165	96,11
1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	789.943.776	762.244.110	96,49
1.2	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	798.440.000	798.010.000	99,95
1.3	Pembangunan Unit Air Baku	97.250.294	97.113.900	99,86
1.4	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6.777.690.835	5.805.674.239	85,66
1.5	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	5.418.137.960	4.714.855.726	87,02
1.6	Rehabilitasi Tanggul Sungai	4.656.099.995	4.260.006.804	91,49
1.7	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.576.184.000	1.466.785.400	93,06
1.8	Normalisasi/Restorasi Sungai	38.167.355.500	38.108.201.986	99,85
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.509.440.000	1.501.964.000	99,50
2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.509.440.000	1.501.964.000	99,50
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>12.735.500.000</b>	<b>12.688.574.215</b>	<b>99,63</b>
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.735.500.000	12.688.574.215	99,63
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	192.564.000	178.583.615	92,74
1.2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.322.600.000	2.290.245.986	98,61
1.3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.220.336.000	10.219.744.615	99,99
IV	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>11.171.360.000</b>	<b>11.064.779.110</b>	<b>99,05</b>
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	11.171.360.000	11.064.779.110	99,05
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	171.360.000	159.845.400	93,28
1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	11.000.000.000	10.904.933.710	99,14
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>693.578.000</b>	<b>562.843.113</b>	<b>81,15</b>
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	693.578.000	562.843.113	81,15
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	397.268.000	355.853.003	89,58
1.2	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	296.310.000	206.990.110	69,86
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>35.653.104.760</b>	<b>30.532.802.583</b>	<b>85,64</b>
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.653.104.760	30.532.802.583	85,64
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	404.800.000	380.030.182	93,88
1.2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	30.895.235.960	25.960.718.741	84,03
1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	4.353.068.800	4.192.053.660	96,30
VII	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.663.379.200</b>	<b>2.652.843.769</b>	<b>99,60</b>

No.	Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	2.663.379.200	2.652.843.769	99,60
1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.663.379.200	2.652.843.769	99,60
VIII	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>81.819.509.161</b>	<b>75.245.456.279</b>	<b>91,97</b>
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	81.819.509.161	75.245.456.279	91,97
1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300.800.000	299.900.000	99,70
1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	76.476.727.961	70.064.927.613	91,62
1.3	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.041.981.200	4.880.628.666	96,80
IX	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>400.000.000</b>	<b>398.629.950</b>	<b>99,66</b>
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	398.629.950	99,66
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	400.000.000	398.629.950	99,66
X	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>228.866.388.103</b>	<b>222.889.741.227</b>	<b>97,39</b>
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	228.866.388.103	222.889.741.227	97,39
1.1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000	196.092.600	98,05
1.2	Pembangunan Jalan	185.023.910.863	181.540.038.469	98,12
1.3	Rehabilitasi Jalan	14.357.826.300	13.594.698.348	94,68
1.4	Pemeliharaan Berkala Jalan	18.497.950.000	17.876.346.032	96,64
1.5	Pembangunan Jembatan	8.160.570.940	7.231.454.577	88,61
1.6	Rehabilitasi Jembatan	2.626.130.000	2.451.111.200	93,34
XI	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>201.520.000</b>	<b>190.364.000</b>	<b>94,46</b>
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	76.707.600	73.687.000	96,06
1.1	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	76.173.000	73.687.000	96,74
1.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	77.148.000	74.817.000	96,98
1.3	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	39.843.600	38.817.000	97,42
1.4	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	36.601.800	36.000.000	98,36
2	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	7.374.400	3.720.000	50,44
2.1	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	4.064.400	2.470.000	60,77
2.2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	3.310.000	1.250.000	37,76
3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40.290.000	38.140.000	94,66
3.1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	39.843.600	38.140.000	95,72
XII	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>3.023.138.193</b>	<b>2.918.342.149</b>	<b>96,53</b>
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	866.501.498	810.648.384	93,55
1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	765.320.798	713.113.784	93,18

<b>No.</b>	<b>Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	101.180.700	97.534.600	96,40
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	980.866.722	98,09
1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.000.000.000	980.866.722	98,09
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	293.658.300	282.275.000	96,12
2.1	Sistem Informasi Penataan Ruang	293.658.300	282.275.000	96,12
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	862.978.395	844.552.043	97,86
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	35.050.900	29.323.759	83,66
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	115.940.995	114.370.150	98,65
3.3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	711.986.500	700.858.134	98,44
<b>Jumlah</b>		<b>456.240.533.524</b>	<b>433.995.981.781</b>	<b>95,12</b>